

Nama : Anggi Kurnia Cahyani

NPM : 2213031043

(Jawaban Studi Kasus)

1. Globalisasi industri dalam dua dekade terakhir telah mengubah struktur dan pola daya saing industri Indonesia secara signifikan. Dalam perspektif global value chains (GVC), Indonesia masih berada pada posisi hilir dengan nilai tambah rendah, terutama dalam sektor seperti tekstil, elektronik, dan otomotif, sehingga rentan terhadap relokasi ketika negara lain menawarkan biaya produksi yang lebih murah. Dependency theory juga menjelaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor barang modal dan komponen membuat industri domestik sulit meningkatkan daya saing struktural karena keterikatan pada teknologi asing dan fluktuasi pasar global. Di sisi lain, teori comparative advantage menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki keunggulan pada sektor berbasis sumber daya alam dan tenaga kerja padat karya, keunggulan tersebut kian tergerus dengan masuknya produk impor murah dari Tiongkok dan Vietnam yang lebih efisien dari segi skala produksi dan inovasi. Dampaknya, restrukturisasi industri dalam negeri berlangsung tidak merata: beberapa sektor naik kelas melalui integrasi rantai pasok global (misalnya otomotif), sementara sektor padat karya tradisional justru tertekan oleh kompetisi harga global.
2. Dalam merespons tantangan globalisasi industri, pemerintah Indonesia telah mengadopsi kombinasi kebijakan protektif dan pro-integrasi. Kebijakan tarif impor selektif diterapkan pada sektor yang dianggap rentan, seperti tekstil dan baja, namun sering kali kurang konsisten sehingga tidak memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Upaya menarik FDI melalui insentif fiskal dan pembentukan kawasan industri berhasil meningkatkan investasi pada sektor otomotif, baterai, dan elektronik, tetapi belum disertai dengan mekanisme technology spillover yang kuat sehingga ketergantungan terhadap teknologi asing masih tinggi. Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi instrumen penting untuk memperkuat basis manufaktur lokal, namun implementasinya menghadapi kendala kapabilitas industri hulu yang belum siap serta resistensi investor asing terhadap pembatasan tersebut. Secara umum, kebijakan yang ada menunjukkan arah yang benar dalam memperkuat industri nasional, tetapi efektivitasnya belum optimal karena ketidaksesuaian antara visi industrialisasi jangka panjang dan kapasitas nyata pelaku industri di lapangan.
3. Berdasarkan analisis tersebut, strategi kebijakan industri Indonesia ke depan perlu bersifat adaptif terhadap globalisasi namun tetap melindungi kepentingan nasional melalui pendekatan

selective integration dan strategic protectionism. Pertama, pemerintah perlu mendorong upgrading dalam GVC dengan memfokuskan investasi pada sektor yang berpotensi naik kelas, seperti elektronik, otomotif listrik, kimia, dan agroindustri berbasis teknologi. Instrumennya mencakup insentif riset dan inovasi, matching fund untuk teknologi baru, serta kemitraan strategis antara BUMN, universitas, dan perusahaan multinasional untuk menjamin transfer teknologi. Kedua, proteksionisme harus diterapkan secara terbatas dan berbasis bukti (evidence-based), dengan mengutamakan dukungan terhadap industri yang memiliki prospek keberlanjutan, bukan sekadar melindungi sektor yang tidak efisien. Ketiga, pemerintah harus memperkuat kebijakan TKDN dengan memperbaiki ekosistem industri hulu, memberikan pelatihan dan sertifikasi SDM industri, dan menciptakan klaster manufaktur terintegrasi agar perusahaan lokal dapat mencapai efisiensi skala. Aktor kunci dalam strategi ini mencakup pemerintah pusat sebagai perumus regulasi, pemerintah daerah sebagai fasilitator investasi, sektor swasta dan UMKM sebagai pelaku utama produksi, serta lembaga riset dan universitas sebagai sumber inovasi. Dengan kombinasi integrasi global yang selektif, perlindungan strategis, dan penguatan kapasitas domestik, Indonesia dapat membangun struktur industri yang tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah dinamika globalisasi.